

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN *OPEN ACCESS* DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI: STUDI KASUS PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DI JAWATENGAH

Eko Handoyo, Universitas Negeri Semarang  
Atin Istiarni, Universitas Muhammadiyah Magelang

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan akses terbuka (*open access*) pada repositori institusi. Sampel yang diambil yaitu Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data menggunakan empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, tahap verifikasi serta penarikan kesimpulan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling purposive* dengan menetapkan dua kriteria sampel yaitu 1) memiliki repositori perpustakaan, 2) memiliki kebijakan pengelolaan repositori perpustakaan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa seluruh perpustakaan PTN di Jawa Tengah telah menggunakan repositori. Adapun *software* yang digunakan rata-rata menggunakan Eprints, selebihnya Slims dan membuat aplikasi sendiri. Konten yang terdapat di repositori adalah karya tulis ilmiah karya sivitas akademika baik dalam bentuk TA, Skripsi, disertasi, jurnal, dan majalah ilmiah. Kebijakan akses yang diterapkan informan menggunakan kebijakan *open access* sebanyak 25%, *partial access* sebanyak 66,67% dan *close access* sebanyak 8,3%. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *open access* adalah 1) Hak cipta masih ada pada penulis 2) Belum ada kebijakan tertulis 3) Kepala perpustakaan tidak memiliki hak penuh untuk menentukan kebijakan 4) terdapat perbedaan pandangan antar pemangku jabatan terhadap repositori institusi akses terbuka berdampak pada kebijakan akses dan aksesibilitas ke repositori institusi, bahwa dalam rangka perlindungan karya akademik diterapkan pembatasan akses. Payung hukum yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan akses repositori pada institusi yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor (SK), *Standard Operating Procedure* (SOP) dan kebijakan perguruan tinggi. Sedangkan peran kepala perpustakaan dalam penerapan repositori sebagai fasilitator dalam penyusunan payung hukum dan kebijakan akses konten repositori.

**Kata kunci:** *open access, repositori institusi, Perguruan Tinggi Negeri Jawa Tengah*

## Abstract

*This research aims to determine the factors that affect the implementation of open access policy in institutional repositories. The sample is taken as a State University library in Central Java. This research uses qualitative methods of descriptive. Data collection using questionnaires and interviews. Data analysis using four stages of data collection, data reduction phase, data presentation phase, verification phase and draw conclusion. Sampling techniques using purposive sampling by assigning two sample criteria are 1) has a library repository, 2) has a library repository management policy. The results of this study show that all of public universities libraries in Java have been using the repository. As for the software used on average using Eprints, Slims and the rest of the apps are made by yourself. The content in the repository is a scientific work of the academic works in both forms final assignments, theses, dissertations, journals, and scientific magazines. Access policy that informant applies using open access policy by 25%, partial access by 66.67% and close access by 8.3%. Factors that affect the implementation of open access are 1) Copyrights still exist on author, 2) There is no written policy 3) The library's head has no full right to determine policy 4) There are differences in the views between the stakeholders and the open Access institution repository impacting the access and accessibility policies to the institutional repository, that in order to protect the academic work is applied restriction of access.*

*Legal provisions used to implement the repository's access policy on the institution by issuing the Rector's Decree, Standard Operating Procedure and university policies. Meanwhile, the role of library head in repository implementation as facilitator in drafting legal provisions and repository content access policy.*

**Keywords:** open acces, institution repository, Central Java State College

## Pendahuluan

Aktivitas penelitian dalam lingkungan pendidikan tinggi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika. Penelitian merupakan salah satu tujuan diselenggarakannya pendidikan tinggi guna dapat memberikan manfaat serta solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Selain itu, aktivitas penelitian juga turut memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan selalu berkembang dan dikembangkan oleh peneliti baik ilmuwan, dosen, mahasiswa, maupun peneliti. Penelitian dilakukan dibanyak bidang, yang bertujuan menemukan satu ilmu baru sebagai solusi dari permasalahan yang timbul dimasyarakat (Bornmann, 2014). Penelitian dilakukan sebagai pilihan untuk mengembangkan pengetahuan karena dalam prosesnya menggunakan kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya atau berbasis *scientific method* (Rejeki et al., 2015). Penyebaran hasil penelitian biasa disebut dengan publikasi ilmiah (Tkaczyk & Collins, 2018). Hasil-hasil penelitian dipublikasikan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Penelitian yang umum dilaksanakan di pendidikan tinggi yaitu penulisan karya tulis ilmiah sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa. Karya tulis ilmiah yang disusun berupa Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, maupun Disertasi, disesuaikan dengan jenjang studi yang diambil. Karya tulis ilmiah yang dihasilkan menjadi salah satu kekayaan intelektual milik perguruan tinggi.

Pada 2017, berdasarkan data Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Ristek Dikti), jumlah unit perguruan tinggi yang terdaftar mencapai 4.504 unit. Angka ini didominasi oleh perguruan tinggi swasta (PTS) yang mencapai 3.136 unit. Sedangkan perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi unit paling sedikit, yakni 122 unit. Sisanya adalah perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi di bawah kementerian atau lembaga negara dengan sistem kedinasan (<https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homographpt>). Jika rata-rata dalam satu kali

periode wisuda, terdapat 100 (seratus) wisudawan, maka jumlah karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh institusi tersebut adalah seratus naskah karya tulis ilmiah. Tentu saja, naskah-naskah tersebut sebagai kekayaan intelektual perlu di kelola dengan baik dan profesional oleh institusi agar tidak hilang dan dapat terus dikembangkan.

Salah satu pihak yang memiliki peran publikasi hasil penelitian adalah perpustakaan. Menurut Manas Das (2018) perpustakaan perguruan tinggi memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Pengumpulan dan penyebaran informasi.
2. Layanan informasi
3. Pusat literasi dalam konteks akademik.
4. Repositori dari berbagai penelitian.

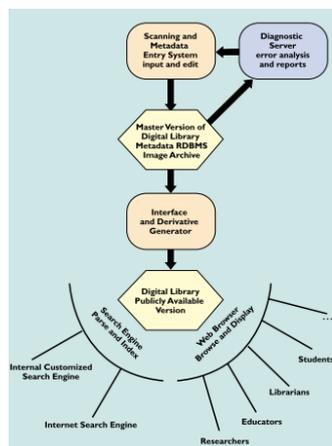
Keempat fungsi tersebut saat ini terus dikembangkan oleh oleh pengelola perpustakaan. Perkembangan teknologi turut serta berpengaruh pada inovasi pengembangan layanan perpustakaan dalam mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kelahiran dan perkembangan teknologi informasi, terutama yang dimotori oleh teknologi komputer, memang kemudian mempercepat dan mengubah berbagai praktik penting di bidang perpustakaan, informasi, dan dokumentasi (Pendit, 2008). Perubahan sosial masyarakat yang memandang teknologi informasi yang semula hanya sebatas mesin pengolah menjadi teknologi utama dalam pencarian informasi maupun hubungan antar masyarakat global juga memberikan pengaruh pada model layanan perpustakaan. Penerapan layanan berbasis digital dan daring kini sudah dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi untuk memberikan layanan prima kepada pemustaka di samping juga tetap memberikan layanan secara fisik.

Salah satu model layanan yang terus dikembangkan adalah layanan Perpustakaan Digital. Perpustakaan digital diartikan sebagai perpustakaan modern yang menggunakan sistem otomatisasi dalam operasionalnya serta memiliki koleksi bahan pustaka sebagian besar dalam bentuk format digital yang disimpan dalam arsitektur komputerisasi dan bisa diakses melalui

komputer (Susanto, 2010). Dalam penggunaan komputerisasi yang digunakan *digital library* dapat membantu pelaksanaan operasional perpustakaan baik untuk pustakawan atau pemustaka. Bagi pustakawan, *digital library* akan membantu operasional fungsi-fungsi otomatis yang tersedia, sehingga proses pengelolaan perpustakaan akan menjadi efektif dan efisien. Sedangkan untuk pemustaka pelaksanaan *digital library* dapat memudahkan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dalam proses pencarian literatur (Susanto, 2010).

Menurut Seadle & Greifeneder (2007) perpustakaan digital adalah sumber daya yang merekonstruksi substansi intelektual dan layanan perpustakaan tradisional dalam bentuk digital. Perpustakaan digital terdiri dari konten digital (yang kadang-kadang tetapi tidak harus berbasis teks), interkoneksi (yang mungkin berupa tautan sederhana atau metadata kompleks atau hubungan berbasis permintaan), dan perangkat lunak (yang mungkin berupa halaman sederhana dalam HTML atau sistem manajemen basis data yang kompleks).

Konsep *digital library* dijelaskan oleh McCray & Gallagher (2001) yang menjelaskan bahwa perpustakaan digital mempunyai konsep otomatisasi dalam melakukan operasional/kegiatan perpustakaan. Berikut adalah konsep *digital library* yang disampaikan oleh McCray & Gallagher.



Gambar 1. Konsep pembuatan dan akses digital library

Salah satu arsitektur komputerisasi yang banyak digunakan adalah repositori. Institusi atau lembaga saat ini juga menerapkan repositori yang kemudian dikenal dengan istilah Institutional Repository (simpanan kelembagaan). Istilah Institutional Repository atau "Simpanan Kelembagaan" merujuk ke sebuah kegiatan menghimpun dan melestarikan koleksi digital yang merupakan hasil karya intelektual dari

sebuah komunitas tertentu (Pendit, 2008). Perpustakaan perguruan tinggi seperti yang telah disebutkan sebelumnya mempunyai fungsi repositori informasi yang disimpan untuk digunakan generasi sekarang dan mendatang (Das, 2018). Konten yang dikelola dalam repositori institusi perpustakaan perguruan tinggi umumnya merupakan hasil-hasil penelitian dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan yang menjadi kekayaan milik lembaga. Repositori institusi dapat memberikan banyak fungsi bagi lembaga, ilmu pengetahuan, dan peneliti maupun akademisi (Crow, 2002). Repositori institusi dapat meningkatkan lembaga yang lebih unggul karena dapat menjadi media informasi untuk melakukan riset, peneliti potensial dan pencarian referensi untuk mahasiswa (Ernaningsih, 2017). Repositori institusi digunakan sebagai platform utama dalam pengelolaan publikasi skripsi, tesis dan disertasi (Clement & Rascoe, 2013). Namun sekarang ini, repositori dikembangkan untuk dapat mencakup semua jenis data penelitian juga sebagai media bertukar informasi dengan mengembangkan sistem akses terbuka.

Repositori sebagai produk *digital library* dijalankan dengan menganut beberapa prinsip dalam penggunaannya yaitu adanya pembaharuan, memahami konten yang dimiliki, keterlibatan tim yang tepat, rancangan sistem yang akan digunakan, pastikan akses terbuka, adanya otomatisasi, adanya standar pelaksanaan dan adanya penunjang untuk menjaga kualitas (McCray & Gallagher, 2001). Meskipun banyak keunggulan dan manfaat yang didapat dari menerapkan repositori institusi namun, seringkali pengelola perpustakaan mengalami beberapa kendala seperti belum ada kebijakan pimpinan, anggaran, infrastruktur, SDM Pengelola dan permasalahan hak cipta. Akses terbuka dan permasalahan hak cipta menjadi topik yang masih diperdebatkan oleh pengampu kebijakan sehingga berpengaruh pada pelaksanaan akses terbuka untuk konten di repositori institusi. Diperlukan kajian lebih lanjut tentang penerapan repositori dan serta akses terbuka konten repositori. Hasil kajian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara langsung dan akhirnya dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan *open access* Repositori Institusi pada khususnya dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Melalui hasil kajian ini juga diharapkan akan ada diskusi lebih lanjut guna mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam artikel ini, yang dijadikan objek kajian adalah repositori institusi milik perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri yang ada

di Jawa Tengah. Sebagai institusi milik negara di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemendikbud) tentunya dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. Namun demikian, ada beberapa kebijakan teknis yang diperbolehkan untuk disusun sendiri dan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi seperti kebijakan akses repositori institusi.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan kemudian dirumuskan permasalahannya adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan akses terbuka di Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah?

### Tinjauan Pustaka

#### 1. Perpustakaan digital

Perpustakaan digital untuk pertama kali diperkenalkan oleh NSF/DARPA/NASA pada tahun 1994 dalam bidang digitalisasi dokumen dan pembangunan sistem untuk dokumen digital. Perpustakaan digital (*digital library* atau *electronic library*) adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi bahan pustaka sebagian besar dalam bentuk format digital yang disimpan dalam arsitektur komputerisasi dan bisa diakses melalui komputer (Susanto, 2010). Transformasi dari sistem perpustakaan tradisional ke perpustakaan digital, memerlukan formulasi kebijakan, perencanaan strategis secara holistik termasuk aspek hukum (copyrights), standarisasi, pengembangan koleksi, infrastruktur jaringan, metoda akses, pendanaan, kolaborasi, kontrol bibliografi, pelestarian, dan sebagainya untuk memandu keberhasilan mengintegrasikan format non digital ke format digital.

Menurut Susanto (2010) perancangan *digital library* digambarkan dengan *fish design* sebagai berikut :



Gambar 2. Fish Design Digital Library

Perpustakaan digital (Jones, Andrew, & Maccoll, 2006) pada dasarnya menyimpan dan memanipulasi bahan dalam format elektronik secara efektif. Penelitian ke perpustakaan digital adalah penelitian ke dalam sistem informasi jaringan, berkonsentrasi pada bagaimana mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk secara efektif memanipulasi informasi di Internet. Masalah teknologi utama adalah bagaimana mencari dan menampilkan pilihan yang diinginkan dari dan di seluruh koleksi besar. Untuk mengarahkan perpustakaan institusi menjadi perpustakaan digital diperlukan adanya Website sebagai tempat untuk menginformasikan layanan berbasis cetak dan webnya serta untuk menyatukan konten yang disediakan untuk penggunanya. Dalam websiter tersebut nantinya katalog yang dilengkapi alat pencarian koleksi jurnal elektronik, koleksi bahan digital yang tersedia di perpustakaan sehingga layanan dapat dijangkau lebih luas.

#### 2. Institutional Repository ( Repositori Institusi)

Repositori institusi mungkin terutama berlaku dalam konteks publikasi penelitian, karena mereka berasal dari institusi, dan dengan teknologi yang tepat di tempat dapat ditangkap pada sumbernya dan dibangun ke dalam layanan. Repositori institusional dapat, oleh karena itu, berfungsi sebagai penerbit bahan penelitian - makalah peer-review, e-print, tesis, laporan, makalah konferensi, kertas kerja dan jenis dokumen lainnya. Menurut Royster (2008), repositori institusi berfungsi sebagai penerbit materi asli yang sebelumnya tidak pernah diterbitkan di tempat lain, dan menilai potensi penggunaannya sebagai "resor pertama" yang layak untuk publikasi ilmiah. Selain mempunyai fungsi untuk penyimpanan arsip dan peningkatan akses karya ilmiah, repositori juga dapat berperan menjadi media penerbitan *online* untuk penulis secara umum.

Repositori Institusi adalah dukungan teknologi dalam perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital. Menurut Saini (2018) *Institutional Repository* adalah database berbasis web ilmiah yang berisi rekaman bahan untuk pelestarian jangka panjang menggunakan software *OAI-compliant* untuk mengumpulkan, menyimpan, melestarikan dan menyebarkan materi ilmiah dalam bentuk digital dalam satu institusi. Repositori menurut Crow (2002) merupakan perpustakaan digital karena mampu menampung penelitian asli dan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh penduduk institusi dari segala bidang. Perpustakaan menggunakan repositori sebagai produk intelektual yang diciptakan oleh fakultas,

staf peneliti, dan mahasiswa dari sebuah institusi dan dapat diakses oleh pengguna akhir baik di dalam dan di luar lembaga dengan keterbukaan untuk mengakses. Menurut Crow (2002) repositori institusi berisi :

1. Identitas Institusi
2. Karya Ilmiah
3. Karya didalamnya permanen
4. Dapat diakses secara terbuka dan dioperasikan

Repositori institusi secara signifikan berhubungan dengan tempat hasil penelitian dari hasil validasi oleh pakar atau pembimbing karya tulis ilmiah pada domain ilmu pengetahuan tertentu. Repositori institusi berfungsi sebagai penerbit bahan penelitian, makalah, e-print, tesis, laporan, makalah konferensi, kertas kerja dan jenis dokumen lainnya (Jones et al., 2006).

### 3. Open Access pada Repositori Institusi

Saat ini, perkembangan dunia digital mau tidak mau juga memberikan dampak pada publikasi karya tulis ilmiah yang merembet pada permasalahan hak cipta. Keinginan masyarakat untuk mengakses informasi dari internet secara utuh saat ini masih terhambat pada pembatasan akses pada konten-konten tertentu yang biasanya dimiliki oleh suatu lembaga atau institusi. Karya Tulis Ilmiah menjadi konten yang banyak dibatasi dalam aksesnya yang mirisnya pembatasan dilakukan oleh lembaga atau institusi yang mempublikasikan, bukan oleh pemiliki hak cipta yaitu penulis. Pembatasan akses terhadap karya tulis ilmiah dapat dilihat dari penutupan akses pada konten-konten tertentu bagian dari sebuah karya tulis ilmiah yang diterbitkan dalam repositori institusi.

Ide tentang Akses Terbuka atau *Open Access* tidak terlepas dari tiga gerakan atau kesepakatan yang melibatkan ratusan institusi informasi yaitu *Budapest Open Access Initiative* (Februari 2002), *Bethesda Principles* (Juni 2003), dan *Berlin Declaration* (Oktober 2003) (Pendit, 2008). Gerakan ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakadilan bahwa karya pengarang atau peneliti yang dimuat di jurnal maupun majalah ilmiah, hak ciptanya bukan di tangan penulis tapi ada di tangan penerbit jurnal terutama penerbit jurnal komersial (Ernaningsih, 2017). Berdasarkan latar belakang dan keresahan yang dialami oleh peneliti, maka dalam *Budapest Open Access Initiative* menghasilkan kesepakatan tentang definisi *Open Access* yaitu:

*“By ‘open access’..., we mean its free availability on the public*

*internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyrights in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited”*  
(<https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai15-1>)

Melalui definisi tersebut dapat dipahami bahwa akses terbuka atau *open access* merupakan sebuah gagasan untuk memberikan kebebasan akses pada suatu karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pendidikan dan penelitian, dan bukan untuk tujuan komersil. Peneliti/penulis sebagai pemegang hak cipta, menghibahkan karyanya untuk diakses dan dibaca oleh khalayak luas namun dengan syarat membubuhkan sitasi. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Ghosh and Kumar Das (dalam Asmad dkk., 2018) yang menyatakan bahwa *Open Access* (OA) dapat diartikan sebagai cara untuk mengakses ataupun membuat konten digital yang memiliki kebebasan hak cipta maupun tidak dan tanpa adanya batas lisensi serta bebas biaya demi keperluan keilmuan.

Pada dasarnya semua repositori harus mematuhi sejumlah aturan dasar teknis yang sama yaitu *OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting)* yang mengatur bagaimana cara repositori menyusun, mengelompokkan, menamai, dan memperlihatkan isinya kepada mesin pencari web (*search engine*), dengan mematuhi aturan dasar tersebut maka interoperabilitas di antara repositori dapat terwujud (Ernaningsih, 2017).

Karya tulis ilmiah dan keluaran hasil penelitian, dihimpun dan dikelola untuk dapat di akses oleh masyarakat luas melalui aplikasi berbasis web. Hal tersebut sesuai dengan konsep repositori sistem *open access*. Saat ini, dua aplikasi repositori yang banyak digunakan oleh perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia adalah Eprints dan DSpace, di samping itu terdapat beberapa perpustakaan yang

mengembangkan sendiri repositori milik institusinya.

Akses terbuka pada repositori memberikan pengaruh yang positif bagi institusi karena karya yang dihasilkan akan lebih sering dikutip oleh penulis lain (Cullen & Chawner, 2011). Namun open access repositori juga menimbulkan beberapa masalah yang berkaitan dengan kebijakan (McCray & Gallagher, 2001). Kebijakan berkaitan dengan perlindungan hak karya penulis dan kebijakan keterbukaan informasi yang menjadi salah satu prinsip *digital library*. Akses terbuka tidak hanya diartikan informasi dapat dilihat secara lengkap tanpa batasan namun juga informasi dapat diakses dengan tanpa menggunakan alat khusus.

Menurut Valentine Stanton & Li Liew (2011) pandangan *open access* terhadap karya tulis mahasiswa dalam repositori mempunyai segi positif dan negatifnya. Di satu sisi, akses terbuka karya tulis mahasiswa menarik, karena penulis mahasiswa dapat menyebarkan penelitian mereka ke khalayak luas dan dapat dikutip lebih mudah oleh para peneliti di komunitas akademik. Di sisi lain, pengarsipan akses terbuka dapat menimbulkan kekhawatiran tentang hak cipta, plagiarisme, dan publikasi temuan yang prematur.

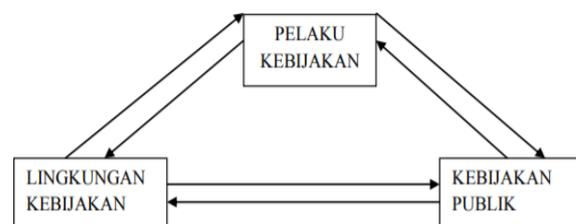
#### 4. Kebijakan Layanan

Kebijakan adalah panduan bagaimana berjalannya sistem atau proses akan digunakan sekaligus sebagai pedoman pengguna dapat menggunakannya. Secara etimologis kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta polis (negara kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam Bahasa Inggris Pertengahan *policie* yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran).

Menurut Leo Agustino (2008) kebijakan diartikan sebagai rangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan (kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai

tujuan tertentu. Dalam membuat kebijakan hal yang menjadi dasar adalah adanya maksud dan tujuan yang akan dicapai. Kebijakan yang dilakukan nantinya adalah apa yang akan dikerjakan dalam proses mencapai tujuan.

#### Elemen sistem kebijakan



Gambar 3. Elemen sistem kebijakan

Suatu sistem kebijakan (*policy system*) atau seluruh pola institusional di mana didalamnya kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Kebijakan publik (*public policies*) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak. Kebijakan yang ada dalam repositori akan berkembang dan digunakan sesuai dengan perkembangan institusi serta perkembangan penggunaannya. Ada banyak panduan untuk pengembangan kebijakan repositori yang dan banyak berputar di sekitar pertanyaan tentang konten, bagaimana konten akan masuk ke dalam repositori dan apa yang akan terjadi setelah dipublikasikan dalam repositori. Panduan semacam itu wajib dibaca untuk kebijakan-kebijakan yang sedang berkembang, seperti halnya kebijakan penyimpanan dari lembaga lain.

#### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data menggunakan empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, tahap verifikasi serta penarikan kesimpulan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling purposive* dengan menetapkan dua kriteria sampel yaitu 1) memiliki repositori institusi, 2) memiliki kebijakan pengelolaan repositori perpustakaan. Berdasarkan kriteria yang digunakan, maka jumlah perguruan tinggi negeri yang memenuhi kriteria sebanyak 12 (dua belas) Perguruan Tinggi Negeri dari total populasi sebanyak 12 Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Jawa Tengah. Oleh karena itu, sampel yang digunakan

dalam penelitian ini termasuk dalam sampel jenuh.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Penggunaan Repositori pada institusi

Repositori pada institusi perguruan tinggi harus dikonsepsi secara matang dan sistematis sesuai dengan tujuannya. Repositori sebagai salah satu langkah perpustakaan dalam menerapkan *digital library* merupakan upaya pengelola perpustakaan maupun institusi untuk melindungi penelitian asli dan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Crow (2002) pada bab sebelumnya yang menyatakan bahwa repositori merupakan perpustakaan digital karena mampu menampung penelitian asli dan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh penduduk institusi dari segala bidang secara digital.

Seluruh informan dalam penelitian ini sudah menggunakan sistem digital repositori untuk mengelola hasil penelitian sivitas akademika. Ini menunjukkan Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah sudah mengarah pada ekosistem digital. Hasil temuan yang lain menunjukkan bahwa beberapa informan sudah menggunakan sistem digital repositori dalam kurun waktu yang lama yaitu antara 3 sampai dengan 10 tahun. Diharapkan dengan adanya penggunaan sistem pada jangka waktu yang lama dapat memberikan informasi berkaitan dengan fasilitas perpustakaan secara maksimal khususnya pada aspek hasil penelitian.

*Software* repositori yang digunakan oleh informan beragam berdasarkan tujuan dan fungsi

awal. Secara umum informan menggunakan *software Eprints* sebagai repositori institusi dengan alasan mudah penggunaan, bersifat gratis dan sudah banyak digunakan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Selain *Eprints* beberapa informan juga menggunakan *software* lain yaitu *Slims* dan *software* buatan pribadi. Penggunaan sistem repositori dalam bentuk apapun diperbolehkan disesuaikan dengan tujuan dan fungsinya namun yang terpenting yaitu dapat memberikan penilaian yang baik terhadap instansi. Hal ini dikemukakan oleh Royster (2008) yang menyatakan bahwa repositori dapat difungsikan sebagai peningkatan akses karya ilmiah, repositori secara umum juga dapat berperan menjadi media penerbitan *online* untuk penulis. Sehingga sistem digital repositori sudah seharusnya dikembangkan baik dalam manajemen maupun konten yang tersedia.

### 2. Konten Repositori

Jones et al., (2006) yang menyatakan bahwa jenis konten repositori dapat berupa bahan penelitian, makalah, e-print, tesis, laporan, makalah konferensi, kertas kerja dan jenis dokumen lainnya. Sistem digital repositori sebagai *tools* pengelolaan dokumen sangat bergantung pada konten yang tersedia. Semakin beragam dan berkualitas konten akan menambah jumlah pengguna yang mengakses repositori. Hasil temuan penelitian berkaitan dengan konten repositori ada beberapa yang berbeda. Secara umum repositori digunakan untuk sistem arsip dokumen skripsi dan tesis namun tidak sedikit informan menggunakan repositori untuk arsip prosiding, jurnal, dokumen mata kuliah dan buku.

Tabel 1. Konten Repositori

Instansi	Jenis Konten
Universitas A	Tugas akhir mahasiswa, karya dosen, laporan penelitian.
Universitas B	skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah, artikel jurnal dosen, bahan-bahan kuliah
Universitas C	<i>Local Content</i> UNS (semua hasil karya sivitas akademika)
Universitas D	Thesis, skripsi, buku, artikel
Universitas E	Hasil penelitian dosen, tugas akhir mahasiswa, orasi ilmiah
Universitas F	skripsi / tugas akhir mahasiswa, artikel & prosiding dosen & tendik dll
Universitas G	Skripsi, Tugas Akhir Mahasiswa, Laporan Penelitian
Universitas H	Skripsi, tesis, disertasi, makalah, buku, prosiding, laporan akhir
Universitas I	Skripsi dan tesis
Universitas J	Skripsi, Tesis, Hasil Penelitian
Universitas K	1. Tugas akhir akademik : karya seni, skripsi, tesis, disertasi. 2. Monograf : buku2 yang ditulis oleh sivitas akademika. 3. Paten. 4. HAKI. 5. Artikel ilmiah. 6. Artikel populer. 7. Audio. 8. Video. 9. Laporan penelitian. 10. Laporan KKN. 11. Prosiding
Universitas L	karya akhir mahasiswa (tesis, skripsi, tugas akhir), karya ilmiah dosen dan tendik (buku, artikel, prosiding, modul, <i>book section</i> , laporan penelitian)

### 3. Kebijakan Akses Repositori

Perpustakaan Nasional Australia memberikan definisi mengenai kata "akses" merupakan

bagian dari sebuah layanan yang terpadu untuk mempermudah pengguna perpustakaan dalam memanfaatkan sumberdaya informasi, juga terkandung semangat membuka fasilitas seluas-luasnya bagi sebanyak mungkin orang untuk menggunakan sumberdaya informasi yang tersedia (Pendit, 2008). Dalam dunia informasi, kata “akses” kemudian diasosiasikan kemudahan dan keterbukaan, namun pada aspek tertentu ada beberapa hal yang menjadi alasan untuk memberlakukan pembatasan akses informasi digital terutama karya ilmiah hasil penelitian yang di publikasikan melalui jurnal elektronik maupun repository institusi. Oleh karena itu, muncul penggolongan akses informasi digital ke dalam tiga golongan yaitu akses terbuka (*open access*), akses sebagian (*partial access*), dan akses tertutup (*closed access*).

### 3.1 Open Access

Kebijakan *open access* diambil untuk mewujudkan keterbukaan informasi institusi terkait hasil penelitian namun dalam pelaksanaan *open access* perlu adanya pencegahan tindak plagiarisme oleh pengguna. Beberapa perguruan tinggi menggunakan sistem keamanan pada

dokumen yang telah di unggah. Sebelum akses terbuka diberlakukan pada dokumen perlu adanya kesepakatan secara tertulis antara institusi dan penulis berkaitan dengan publikasi karya yang dihasilkan pada saat proses penyerahan karya tulis.

### 3.2 Partial

Selain *open access* ada juga yang memberlakukan kebijakan partial akses yaitu pada bab tertentu pengguna dapat mengakses informasi namun pada bab yang lain tidak dapat mengakses. Informan juga ada yang membedakan beberapa jenis konten yang akses terbuka dan akses tertutup sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan institusi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga karya cipta penulis pada bagian tertentu yang berkaitan dengan hasil temuan penelitian.

### 3.3 Closed Acces

Kebijakan yang diberlakukan oleh satu informan adalah *close acces*, yaitu konten yang ada dalam repository tidak dapat diakses. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan data yang ada dalam repository.

Tabel 2. Kebijakan Akses

Instansi	Kebijakan akses
Universitas A	Hampir semua tersedia <i>open access</i> , kecuali sebagian kecil dokumen karena alasan tertentu tidak bisa dibuka.
Universitas B	Sesuai dengan kebijakan di tiap koleksi dan bagian masing-masing
Universitas C	Partial
Universitas D	<i>Open access</i> : Keterbukaan dan pencegahan plagiarism
Universitas E	<i>Close access</i> , karena untuk menjaga kewanaman data
Universitas F	Sesuai dengan permintaan penulis, jika penulis memilih pilihan <i>open</i> maka akan kami <i>open access</i> . Jika tidak memilih maka <i>closed access</i> . Alasannya supaya tidak terjadi lepas tanggungjawab isi karya.
Universitas G	Partial. Karena menyesuaikan dengan kebijakan yang sudah ditentukan dan untuk melindungi hak cipta penulisnya.
Universitas H	Partial, masih menjaga nilai-nilai terkait hak cipta dan kutipan
Universitas I	<i>Open access</i>
Universitas J	<i>Open Access</i> , keterbukaan informasi
Universitas K	Campuran antara <i>open acces</i> dan <i>closed acces</i> . Alasannya bahwa spirit membangun repository untuk publikasi nasional dan internasional, sedangkan <i>closed acces</i> karena adanya kepentingan internal.
Universitas L	<i>Partial acces</i> , berdasarkan keputusan pada rapat pimpinan

Beberapa perbedaan kebijakan akses yang telah diberlakukan institusi tersebut terjadi karena sudah menggunakan sistem *online* sehingga kita tidak dapat memantau dokumen setelah diakses. Namun, repository sebagai produk *digital library* sudah seharusnya memiliki beberapa prinsip dalam penggunaannya yaitu adanya pembaharuan, memahami konten yang dimiliki untuk menentukan kebijakan akses yang sesuai, keterlibatan tim yang tepat sehingga dalam mengelola repository dapat berjalan

dengan baik, rancangan sistem yang akan digunakan dapat melindungi hak karya cipta penulis dan mendukung adanya keterbukaan informasi, memastikan akses terbuka, adanya otomatisasi, adanya standar pelaksanaan untuk menjadi pedoman penggunaan repository dan adanya penunjang untuk menjaga kualitas (McCray & Gallagher, 2001). Penerapan kebijakan pada setiap informan berhubungan erat dengan hak karya cipta tersebut. Berdasarkan hasil penelitian hak karya cipta yang

telah disetujui oleh penulis untuk dipublikasikan maka akan menjadi hak institusi. Secara umum informan menyerahkan hak karya cipta kepada penulis meskipun sifatnya terbuka.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 25% instansi yang secara tegas memberikan akses secara terbuka ke repositori institusi. Salah satu informan menyampaikan bahwa memberikan akses terbuka pada repositori institusi sebagai upaya pencegahan tindak plagiarisme. Pernyataan tersebut cukup mengejutkan karena selama ini yang menjadi alasan untuk tidak membuka akses pada karya ilmiah yang terpublish melalui repositori institusi adalah ketakutan apabila karya ilmiah tersebut akan diplagiat. Namun, pada kenyataannya dengan melakukan *open access*, karya ilmiah yang di unggah secara daring dapat dengan mudah terindex oleh mesin pencari dan bahkan dapat melacak kesamaan konten. Dengan begitu, pernyataan bahwa 'jika dibuka, maka takutnya akan diplagiat' dapat dipatahkan karena dengan sistem terbuka justru dapat mencegah tindak plagiat karena apabila karya ilmiah tersebut adalah hasil plagiat akan dapat segera terlacak secara *online*.

Terdapat 8,3% dengan tegas menyatakan bahwa sistem yang diberlakukan untuk repositorinya yaitu akses tertutup (*closed access*) dengan alasan untuk melindungi data penelitian. Dalam sebuah penelitian, memang tidak dapat terlepas dari adanya data penelitian. Beberapa sumber data penelitian memang ada yang bersifat sensitif seperti data perusahaan, data pasien, dan data pemerintahan. Namun

demikian, sangat disayangkan apabila alasan keamanan data penelitian menyebabkan semua bagian dalam karya tulis tersebut tidak dapat diakses. Hal tersebut sangat berpengaruh pada perangkungan dalam *Webometrics* yang juga berpengaruh pada integritas institusi itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa sebanyak 66,67% perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah menerapkan sistem partial dalam akses ke repositori institusinya. Dapat dikatakan, perpustakaan tersebut masih setengah-setengah dalam memberikan akses kepada pengguna. Permasalahan hak cipta menjadi salah satu alasan mengapa perpustakaan tersebut menggunakan sistem partial. Padahal, jika ditinjau dari definisi *Open Access* yang dihasilkan dari kesepakatan *Budapest Open Access Initiative* yang menyatakan bahwa pemegang lisensi dalam hal ini adalah pengarang karya ilmiah dengan suka rela menghibahkan karya ilmiah yang disusun untuk disebarluaskan dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, pernyataan-pernyataan di Bethesda dan Berlin secara hampir serupa menandakan bahwa pemegang hak cipta sebuah karya yang akan diberikan status *Open Access* membuat pernyataan mengizinkan semua orang 'menyalin, menggunakan, menyebarkan, mengirim dan menampilkan sebuah karya kepada umum termasuk membuat karya turunannya, dalam segala medium digital' (Pendit, 2008). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka konsep *Open Access* sejatinya tidak bertentangan dengan prinsip hak cipta.

Tabel 3. Hak Cipta

Instansi	Hak Cipta
Universitas A	Hak cipta tetap ada pada penulis.
Universitas B	Belum ada ketentuan tertulis mengenai hak cipta
Universitas C	Perpustakaan, namun jika ada keberatan dari penulis karya tdk dipublikasikan
Universitas D	sudah otomatis menjadi hak cipta penulisnya
Universitas E	penulis
Universitas F	Tetap hak penulis
Universitas G	Hak cipta milik perpustakaan, kecuali jika ada yang keberatan untuk dipublish maka perpustakaan tidak akan mempublikaskannya
Universitas H	Penulis
Universitas I	Hak penulis
Universitas J	Penulis, Perpustakaan mendapat ijin untuk publikasi dari penulis/hak bebas royalti non-eksklusif
Universitas K	Hak cipta telah diberikan legalitas oleh penulis kepada perpustakaan sebagai pengelola informasi.
Universitas L	Perpustakaan

Meskipun karya tulis ilmiah yang dihasilkan sivitas akademika merupakan milik institusi, namun hak cipta tetap berada di tangan penulis. Dalam hal ini, kebijakan untuk membuka

atau menutup karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan di repositori institusi berada di tangan pemilik hak cipta. Namun, ada 4 (empat) institusi yang telah memberikan hak cipta kepada

perpustakaan untuk mengelola karya tulis ilmiah yang diserahkan. Oleh karena hak cipta masih pada penulis karya, maka keputusan perpustakaan untuk memberikan akses terbuka, sebagian, atau tertutup masih berdasarkan ijin dari penulis karya.

Berbagai alasan lain yang disebutkan oleh informan memberikan gambaran bahwa perpustakaan sebagai unit pengelola repositori institusi belum memiliki kewenangan secara penuh untuk membuat kebijakan mengenai akses pada repositori. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh informan juga dapat diketahui bahwa ada kemungkinan ketidakpahaman secara menyeluruh tentang konsep *Open Access* dan prinsip Hak Cipta baik dari sisi pengelola repositori maupun institusinya sehingga terjadi perbedaan pandangan antar pihak terkait.

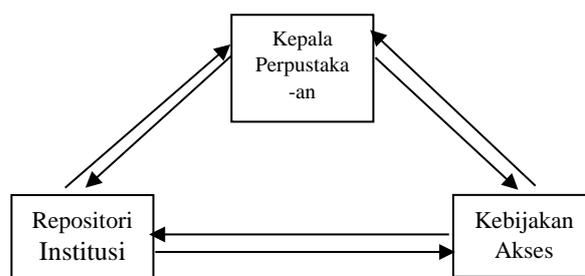
#### 4. Payung Hukum

Penggunaan aturan dalam repositori dijelaskan oleh McCray & Gallagher (2001) yang menyatakan bahwa perlu adanya standar pelaksanaan yang menjadi pedoman penggunaan repositori sehingga kualitas dan konten repositori dapat terjaga dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, payung hukum yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan akses pada repositori institusi yaitu Surat Keputusan Rektor (SK), *Standard Operating Procedure* (SOP) dan kebijakan perguruan tinggi. Hal tersebut juga memberikan gambaran bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Repositori Institusi sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup. Penerbitan peraturan sangat penting untuk melindungi proses dan penggunaan repositori agar dapat berjalan sesuai prosedur. *Open Access* yang sebagian besar diberlakukan oleh informan diimbangi dengan peraturan yang sebagai dasar hukum. Adanya dasar hukum pelaksanaan akses repository institusi dapat membantu pengelola dalam menjalankan repository. Tentu saja, dibutuhkan kesepahaman antara pimpinan dan pelaksana teknis dalam menerbitkan sebuah aturan sebagai payung hukum agar apabila terjadi kendala di lapangan maupun complain dari user, dapat diatasi sesuai dengan standart *operating procedure* yang telah disepakati.

#### 5. Peran Pimpinan Perpustakaan dan Pimpinan Institusi

Peran beberapa pihak diperlukan untuk membuat kebijakan dapat bersifat fundamental. Informan memberikan beberapa data peran pimpinan perpustakaan dalam pembuatan kebijakan akses repositori yaitu sebagai leading sector, penyusun draf kebijakan dan mengusulkan kebijakan pada tingkat pimpinan

institusi. Peran penting kepala perpustakaan tersebut akan memberikan sinergi yang baik pada pelaksanaan kebijakan. Kebijakan *open access* yang menjadi keharusan dalam ekosistem digital ini akan berjalan dengan baik ketika peran tersebut berjalan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggambarkan hubungan beberapa elemen dalam sistem kebijakan akses digital repositori. Keterkaitan elemen tersebut digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4. Elemen sistem kebijakan

Berdasarkan Gambar 4, Kepala Perpustakaan mempunyai peran untuk membuat dan memonitoring berjalannya kebijakan akses sebagai bahan evaluasi ketika kebijakan ada yang kurang tepat, kebijakan harus disesuaikan dengan lingkungan kebijakan yaitu dalam hal ini repositori institusi yang berkaitan dengan konten, fasilitas, infrastruktur dan informasi. Kebijakan *open access* dapat dilakukan pada repositori ketika hubungan antar elemen tersebut dapat berjalan dengan baik.

Namun, lain halnya yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan kebijakan terutama kebijakan akses pada repositori setidaknya melibatkan tiga pihak yakni Pimpinan Perguruan Tinggi, Peneliti/Penulis/Pengarang Karya Ilmiah, dan Kepala Perpustakaan. Pimpinan perpustakaan dalam hal ini Kepala Perpustakaan tidak dapat secara absolut menerbitkan peraturan akses repositori institusi. Pengaruh pihak-pihak luar perpustakaan terutama Pimpinan Perguruan Tinggi sangat besar karena perpustakaan masih dipandang sebagai pelaksana teknis, bukan penentu kebijakan secara mutlak. Beberapa alasan seperti kualitas Karya Ilmiah yang masih kurang memenuhi standar, keamanan data penelitian, ketakutan karya tersebut diplagiat dan ketakutan ketahuan melakukan plagiat menjadi pertimbangan Pimpinan Perguruan Tinggi memutuskan pemberlakuan *Partial Access* bahkan *Closed Access*.

Pada tataran pimpinan perguruan tinggi dan dosen juga masih terjadi pro dan kontra tentang pemahaman akses terbuka. Sayangnya, pihak yang kontra pada akses terbuka pada repositori institusi lebih dominan jumlahnya

dibandingkan dengan yang pro. Di sisi lain, indikasi bahwa belum adanya kesepahaman antara Kepala Perpustakaan dan pengelola Repositori serta pustakawan terkait Akses Terbuka akibat kurangnya wawasan, pengetahuan, serta sudut pandang menyebabkan posisi Perpustakaan tidak terlalu kuat untuk menyuarakan argumennya tentang *Open Access* kepada pemangku kebijakan. Rotasi pimpinan dan restrukturisasi yang hampir rutin dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali bersamaan dengan pergantian Pimpinan Perguruan Tinggi juga menjadi faktor yang menyebabkan kebijakan akses pada repositori institusi juga berubah-ubah sesuai dengan keputusan pemangku kebijakan.

Semua permasalahan tersebut muncul dikarenakan kurangnya komunikasi antar pihak yang terlibat dalam pengembangan repositori institusi. Terjadi 'gap' yang menyebabkan komunikasi kurang lancar terutama pihak perpustakaan dan pemangku kebijakan universitas. Bagi perpustakaan Perguruan Tinggi yang masih belum memberlakukan akses terbuka pada repository, dapat belajar tentang teknik bagaimana perpustakaan dapat meyakinkan pemangku kebijakan untuk memberlakukan akses terbuka pada repositori institusi. Dorongan pada akses terbuka harus dilakukan secara massif agar objek kajian penelitian dapat berkembang serta kualitas penelitian mahasiswa, dosen maupun sivitas akademika semakin meningkat sehingga ilmu pengetahuan berkembang.

## Penutup

Berkembangnya teknologi informasi menuntut adanya keterbukaan informasi dan kemudahan akses pada sumber-sumber

informasi. Hal tersebut disebabkan karena terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap teknologi informasi yang semula hanya sekadar kemampuannya mengolah informasi menjadi peranan teknologi informasi dalam memberikan akses seluas-luasnya pada sumber informasi sehingga intensitas penggunaan teknologi semakin meningkat dan hamper setiap saat masyarakat beranggapan dengan teknologi informasi. Hal tersebut mendorong lahirnya layanan perpustakaan perpustakaan berbasis digital. Salah satu produknya adalah repositori institusi. Di Perguruan Tinggi, repositori institusi digunakan untuk menghimpun, menginventarisir, dan menyebarluaskan karya tulis ilmiah maupun produk luaran penelitian yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa maupun sivitas akademika.

Konten yang ada di repositori institusi idealnya diberikan akses terbuka secara penuh kepada user untuk memanfaatkannya. Dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata terdapat berbagai macam hambatan yang menjadi faktor tidak diberlakukannya *Open Access* ke repositori institusi. Meskipun sudah terdapat beberapa Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Jawa Tengah yang sudah memberlakukan *Open Access*, namun lebih banyak perguruan tinggi negeri yang masih setengah-setengah bahkan menutup (*closed access*) ke repository institusi milik lembaganya. Peran kepala perpustakaan sangat vital dalam memberikan pemahaman kepada pemangku kebijakan tentang definisi, konsep dan penatalaksanaan *Open Access*. Peran asosiasi seperti Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) juga penting dalam mengasosisasi perpustakaan perguruan tinggi yang menjadi anggotanya untuk didorong membuka akses secara penuh pada repositorinya. Integritas perguruan tinggi menjadi alasan penting untuk memberlakukan akses terbuka.

## Daftar Pustaka

---

- Asmad, C. C., Mathar, T., Akbar, A. K., Arifin, N., Hijrana., Haruddin., Irmawati., Irawati., Satriani. (2018). Tren perkembangan open access institutional repository pada perguruan tinggi di Indonesia . *Khizanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 6(2), 168-180.
- Clement, G. P., & Rascoe, F. (2013). ETD Management and Publishing in the ProQuest System and the University Repository: A Comparative Analysis. *Journal of Librarianship and Scholarly Communication*, 1(4). <https://doi.org/10.7710/2162-3309.1074>.
- Crow, R. (2002). The case for institutional repositories: A SPARC position paper. *SPARC Senior Consultant*, (8), 1–7. Retrieved from [www.arl.org/sparc/IR/ir.html](http://www.arl.org/sparc/IR/ir.html).
- Cullen, R., & Chawner, B. (2011). Institutional Repositories, Open Access, and Scholarly Communication: A Study of Conflicting Paradigms. *Journal of Academic Librarianship*, 37(6), 460–470. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2011.07.002>.
- Das, M. (2018). Collection development programme of academic libraries in digital era : issues and challenges. *The Research Journal of Social Sciences*, 9(8), 323–337.
- Ernaningsih, D. N. (2017). Kebijakan Akses Institutional Repository: Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Negeri Malang. *Record and Library Journal*, 3(1), 25–37.
- Jones, R., Andrew, T., & Maccoll, J. (2006). The institutional repository in the digital library. In *The Institutional Repository* (pp. 1–247). Retrieved from [https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/858/Chapter\\_1.pdf?](https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/858/Chapter_1.pdf?)
- McCray, A. T., & Gallagher, M. E. (2001). Principles for digital library development. *Communications of the ACM*, 44(5), 48–54. <https://doi.org/10.1145/374308.374339>
- Pendit, Putu Laxman.(2008). *Perpustakaan Digital: dari A sampai Z*. Jakarta: Cita Karya Mandiri
- Royster, P. (2008). Publishing original content in an institutional repository. *Faculty Publications, UNL Libraries*, 34(1), 27–30. <https://doi.org/10.1080/00987913.2008.10765148>
- Saini, O. P. (2018). Understanding the role of institutional repository in digital preservation in academic libraries: A review of literature. *Library Philosophy and Practice*, 2018.
- Seadle, M., & Greifeneder, E. (2007). Defining a digital library. *Library Hi Tech*, 25(2), 169–173. <https://doi.org/10.1108/07378830710754938>
- Susanto, S. E. (2010). Desain Dan Standar Perpustakaan Digital. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 10(2), 17–23.
- Valentine Stanton, K., & Li Liew, C. (2011). Open access theses in institutional repositories: an exploratory study of the perceptions of doctoral students. *Information Research*, 16(4).